

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengembangan hutan kota di Kota Mataram.

5.1.1 Ketersediaan Lahan Hutan Kota Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yaitu dengan menggunakan minitab. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan hasil dan mengefisienkan waktu dalam proses proyeksi penduduk. Analisis yang dilakukan pada minitab menggunakan teknik analisis *double exponensial smoothing* karena data yang diproyeksi bersifat *time series* dan tidak *stasioner*.

Penduduk Kota Mataram terus mengalami penambahan, pada tahun 2011 penduduk Kota Mataram berjumlah 378.400 jiwa, pada tahun 2015 bertambah menjadi 404.598 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Mataram sebesar 437.341 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ampenan sebesar 85.892 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sekarbela.

Analisis kepadatan penduduk memperlihatkan bahwa kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Ampenan dan terendah di Kecamatan Sekarbela dengan rata-rata kepadatan penduduk Kota Mataram tahun 2010 sebesar 61 jiwa/ha, tahun 2015 sebesar 66 jiwa/Ha, dan tahun 2020 sebesar 71 jiwa/Ha. Berdasarkan Pedoman RDTRK Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Ruang Tahun 2008, kepadatan penduduk di Kota Mataram dapat digolongkan dalam kategori kepadatan rendah.

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan penduduk di Kota Mataram dan bila disesuaikan dengan Permen PU No.5/PRT/M/2008 penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan menyatakan bahwa luasan untuk hutan kota dapat disesuaikan dan perkapita luasan 4 m², maka untuk Kota Mataram pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk 404.598 jiwa perlu disediakan lahan hutan kota dengan luas 1.618.392 m² atau 161,839Ha dan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 437.341 jiwa perlu disediakan lahan untuk hutan kota yang berbentuk kompak seluas 1.749.364 m² atau 174,936Ha.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan lahan di Kota Mataram masih mencukupi untuk dikembangkan hutan kota seluas 174,936Ha dari lahan yang

masih tersisa atau dapat dikembangkan seluas 2853,75Ha atau dari luasan rencana RTH sebesar 712,36Ha yang didasarkan pada jumlah pertumbuhan penduduk.

5.1.2 Ketersediaan Lahan Hutan Kota Berdasarkan Kesesuaian Lahan dan Kesesuaian Lokasi

Kesesuaian lahan untuk hutan kota di Kota Mataram dilakukan dengan *overlay* antara beberapa variabel yang telah ditentukan melalui teori-teori dan kebijakan yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang potensial dan tidak potensial untuk pembangunan hutan kota. Variabel-variabel tersebut adalah guna lahan, rencana tata ruang kota, kepadatan penduduk, aktivitas sekitar lahan, aksesibilitas, asosisasi pohon, konservasi air, daerah rawan banjir, sempadan sungai, dan sempadan pantai.

Berdasarkan hasil *Overlay*, maka lahan yang baik untuk dikembangkan adalah lahan yang terdapat dalam rencana RTH Kota Mataram dan memiliki skor 5 (31,88Ha) untuk yang sangat potensial dan skor 4 (113,40Ha) untuk lahan yang potensial. Bila ditinjau dari kebutuhan hutan kota yang dibutuhkan sebesar 174,94 Ha, maka untuk pengembangan yang layak dilakukan pada potensi lahan yang memiliki skor 5, 4, dan sebagian dari lahan yang memiliki skor 3 (29,65Ha) sehingga mampu memenuhi kebutuhan hutan kota berdasarkan proyeksi jumlah penduduk.

Dengan demikian berarti ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan kota berdasarkan kesesuaian lahan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hutan kota sebesar 174,94Ha dari 712,38Ha karena lokasi masih dapat dikembangkan pada lahan yang memiliki kategori sangat potensial, potensial, dan memanfaatkan sebagian lahan dengan klasifikasi cukup potensial.

Berdasarkan lokasi potensial pengembangan hutan kota ditemukan pula tipe pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dengan tipe permukiman, tipe perlindungan, tipe plasma nutfah, tipe rekreasi, dan tipe pengaman.

5.2 Saran

Saran yang diberikan terkait dengan pengembangan hutan kota di Kota Mataram adalah:

- Diperlukan kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota.

- Diperlukan adanya suatu kelembagaan dimana masyarakat memiliki peran dalam hal pengembangan hutan kota, sehingga akan mampu meningkatkan perhatian masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan kota.
- Perlunya anggaran untuk pengembangan hutan kota secara khusus.
- Perlunya perhatian khusus terhadap lokasi potensial hutan kota di sempadan sungai yang kini menjadi lahan terbangun.
- Hasil penelitian ini hanya direkomendasikan untuk hutan kota di Kota Mataram. Arahan-arahan yang diberikan belum tentu sesuai untuk diterapkan pada wilayah lain, karena adanya perbedaan karakteristik, sehingga perlu dilakukan kajian tersendiri.
- Penelitian lanjutan dapat dilakukan mengenai besarnya peran pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan hutan kota.

